

Pemilu Parlemen ke-7 dan Prospek Gerakan Reformasi di Iran

Oleh :
Indriana Kartini

Abstract

Reformism is the belief that gradual changes in a society can change its fundamental structures. This belief also has a great influence in the mind of many Iranian people whose struggle for a change, including the mullahs and politicians that led them changed their face from radical to moderate in a tremendous movement called "the reform movement". This movement has crystallized since Mohammad Khatami has been elected as the President of the Islamic Republic of Iran in 1997 and this event became the first victory of the reform movement. The second victory was obtained by the reformist or the leftist in the 6th parliamentary (Majlis) election in 2000, which strengthened the reform movement. But the scene of victory now has been turning back into the hands of the conservative or the rightist. In the 7th parliamentary election, the rightist who has changed to pragmatic face won the majority of the Majlis seat. This political change happened because of the disillusioned of Iranian people has frustrated by the leftist due to their failure to bring into reality their reform promises. Therefore, solving the people's problem will be the big task of the seventh Majlis, regardless of which faction forms the majority.

Pendahuluan

Dinamika politik Iran senantiasa mengundang sorotan dunia internasional. Menginjak 25 tahun usia Revolusi Islam Iran, negeri kaum "mullah" di Teluk Persia tersebut melangsungkan hajatan nasional. Yakni berlangsungnya pemilu parlemen ke-7 pada 20 Februari 2004 yang dilaksanakan secara serentak di Iran meski sempat terancam gagal akibat situasi politik yang memanas menjelang pemilu.

Memanasnya suhu politik di Iran diwarnai oleh ancaman kubu "reformis" (kiri) yang menguasai parlemen (Majlis) untuk memboikot pemilu sebagai respons terhadap keputusan Dewan Garda yang mendiskualifikasi ribuan calon anggota Majlis yang berasal dari kubu kiri. Bahkan, kubu kiri juga mengusulkan agar pemilu ditunda karena dipandang tidak *legitimate*, namun usulan tersebut dimentahkan oleh keputusan Pemimpin Spiritual Ali Khamenei yang juga didukung oleh Presiden Khatami untuk melangsungkan pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sesuai dengan prediksi sebelumnya, pemilu parlemen ke-7 Iran pada akhirnya memang dimenangkan oleh kubu "konservatif" (kanan). Kemenangan kubu

kanan menandai pula berakhirnya dominasi kubu kiri di parlemen yang hanya bertahan satu periode dan mengembalikan dominasi ke tangan kubu kanan yang telah menguasai parlemen sejak berdirinya Republik Islam Iran 1979.

Kembalinya dominasi kaum mullah "konservatif" di parlemen tentu saja menimbulkan kekhawatiran tidak hanya bagi publik Iran namun juga bagi masyarakat internasional. Akankah gerakan reformasi Iran yang dikomandoi kubu kiri akan lumpuh seiring dengan derasnya gempuran kubu kanan, ataukah kekalahan kubu kiri ini merupakan strategi untuk merapatkan kembali barisan reformis yang terpecah-belah belakangan ini? Oleh karena itu tulisan ini akan mengulas isu tersebut dan mencoba menganalisis prospek gerakan reformasi di Iran pasca pemilu parlemen ke-7.

Manuver Politik Kubu Kanan Menjelang Pemilu

Menjelang pemilu parlemen ke-7 situasi politik Iran menunjukkan derajat ketegangan yang cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh manuver Dewan Garda yang juga salah satu pilar kekuatan kubu kanan,

dengan mendiskualifikasi sekitar 2.500 calon anggota Majelis (parlemen) dari 8.200 calon yang terdaftar. Tindakan Dewan Garda tersebut bukan sesuatu hal baru karena memang Dewan Garda memiliki otoritas untuk menyeleksi dan meloloskan calon anggota Majelis.

Dalam sistem politik Iran, badan legislatif terdiri dari dua institusi penting, yakni Parlemen (Majlis) dan Dewan Garda. *Majlis-e-Shura-ye Islami* (Majlis Konsultatif Islam) yang berperan sebagai parlemen Iran, terdiri dari 290 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Kekuasaan dan fungsi Majelis diatur dalam Konstitusi Republik Islam Iran pasal 71-90. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam sistem politik Iran yang dijamin dalam Konstitusi Republik Islam Iran yang menekankan peran Majelis dalam pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan fundamental di negara tersebut. Dalam pasal 84 Konstitusi Republik Islam Iran disebutkan tanggung jawab yang diemban anggota Majelis secara umum, yaitu:

“Setiap anggota Majelis bertanggung jawab kepada seluruh bangsa dan berhak melahirkan pandangan-pandangan mengenai seluruh urusan negara dalam negeri maupun luar negeri.”

Berdasarkan pasal 93 Konstitusi Republik Islam Iran, lembaga Majelis tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa keberadaan Dewan Garda. Sementara itu, dalam pasal 91 disebutkan bahwa Dewan Garda mempunyai tugas utama menjamin agar keputusan-keputusan Majelis tidak mengabaikan ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsip Konstitusi. Dewan Garda memiliki 12 anggota yang terdiri dari enam orang fuqaha yang ditunjuk oleh Dewan Keimaman dan enam ahli hukum yang diajukan kepada Majelis oleh Dewan Kehakiman Tertinggi untuk masa jabatan enam tahun. Semua anggota Dewan Garda ditunjuk oleh Khamenei sebagai Pemimpin Spiritual, baik secara langsung maupun tak langsung.

Dalam sistem politik Iran, lembaga transendental memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan lembaga profan.¹ Sehingga dalam hal ini, secara kelembagaan otoritas Dewan Garda kurang signifikan karena pengaruh pemimpin spiritual yang sangat besar terhadap institusi tersebut. Namun, dalam konteks politik kontemporer Iran dewasa ini yang diwarnai oleh pertarungan kubu kanan dan kiri, otoritas Dewan Garda sangatlah besar. Dalam proses pemilu di Iran, mulai dari pemilihan anggota Dewan Ahli hingga pemilihan presiden, Majelis, dan pejabat pemerintah harus dilakukan di bawah kontrol Dewan Garda. Lembaga tersebut memiliki kewenangan menolak atau menerima calon anggota parlemen.

Manuver yang dilakukan Dewan Garda menjelang pemilu parlemen kali ini menjelma menjadi sebuah kontroversi karena mayoritas caleg yang didiskualifikasi berasal dari kubu kiri termasuk sejumlah anggota Majelis yang masih aktif dengan alasan mereka tidak memenuhi syarat dilihat dari sudut pandang agama. Sebanyak 1.200 kandidat didiskualifikasi karena dianggap tidak menghormati ajaran Islam, sedangkan 1.370 kandidat lainnya didiskualifikasi karena dianggap tidak mampu. Sebagian besar kandidat yang didiskualifikasi berasal dari kubu kiri termasuk lebih dari 80 anggota Majelis (parlemen) saat ini, dari total 290 anggota Majelis Iran.² Manuver politik tersebut justru membawa Iran kepada krisis politik — yang bisa dikatakan terburuk — semenjak Revolusi Islam Iran 1979.

Ketegangan semakin memuncak tatkala kaum garis keras Iran menyerang anggota parlemen kiri “reformis” dalam

¹ Lembaga transendental seperti *Velayat-e Faqih* (pemimpin spiritual), Pengawal Tradisi, Lembaga Keilmuan (Khuzah Al Ilmiah), dan Dewan Ahli. Sedang lembaga profan seperti Lembaga Kepresidenan, Dewan Pengawas Kepentingan Negara, Dewan Tinggi Keamanan Nasional, Parlemen, dan Dewan Garda. Lihat, Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.87.

² “Buyarnya Harapan Kubu Reformis Iran”, dalam *Kompas*, 17 Februari 2004.

sebuah pertemuan untuk menggalang upaya pemboikotan pemilu. Menurut kantor berita IRNA, sekitar 200 anggota gerakan radikal Hezbollah Islam menyerbu masuk ke gedung tempat diselenggarakannya pertemuan di kota Hamedan dan mencederai sejumlah pembicara, termasuk pemimpin mahasiswa Said Razavi Fagih, anggota parlemen reformis Hossein Loghmanian, serta Hossein Mojahed, ketua partai pro-reformasi Front Partisipasi Islam Iran (IIPF).³

Dalam rangka mengakhiri krisis politik yang terjadi maka Majelis mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) yang pertama kali dilakukan sejak Revolusi Islam 1979. RUU ini disusun dengan tujuan utama membatalkan pendiskualifikasian ribuan caleg reformis yang akan bertarung dalam pemilu parlemen ke-7. Pasal-pasal yang menjadi inti dari RUU di antaranya adalah: *Pertama*, RUU disusun sebagai dasar mengamandemen UU Pemilu; *Kedua*, mendesak Dewan Garda untuk membatalkan pendiskualifikasian anggota parlemen yang sudah disetujui kelayakannya pada pemilu parlemen lalu dapat berkompetisi dalam pemilu, kecuali terdapat bukti-bukti hukum kuat yang menunjukkan bahwa mereka memang tidak layak dipilih; *Ketiga*, menuntut Dewan Garda untuk meloloskan siapa pun yang akan menjadi calon anggota legislatif jika yang bersangkutan telah dinilai oleh dewan pengawas pemilu daerah sebagai tokoh yang setia terhadap Islam dan pemerintah Islam yang berkuasa.

RUU darurat yang diajukan Majelis dengan harapan mengakhiri krisis politik ternyata sia-sia belaka. Dewan Garda kembali menggunakan hak vetonya untuk menolak RUU tersebut karena dianggap inkonstitusional atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Penolakan tersebut pada akhirnya semakin meningkatkan ketegangan politik yang telah terjadi antara kubu kiri dan kanan. Dalam sidang parlemen yang disiarkan secara langsung melalui radio, anggota parlemen reformis terkemuka, Mohsen Mirdamadi, menyata-

kan bahwa usaha legislasi untuk memperbaharui UU Pemilu harus ditinggalkan karena melanjutkan usaha ini hanyalah sia-sia.

Sebenarnya dalam mekanisme politik Iran, Dewan Kemaslahatan Negara (*Expediency Council*) yang saat ini dipimpin oleh mantan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, bertugas menyelesaikan perselisihan antara Majelis dan Dewan Garda. Namun, kemungkinan besar Dewan Kemaslahatan Negara akan menentang usaha kubu kiri dan cenderung membela kepentingan kubu kanan. Oleh karena itu bagi kubu kiri di parlemen, mengirim RUU kepada Dewan Kemaslahatan Negara juga tak akan menyelesaikan persoalan karena netralitas Dewan Kemaslahatan Negara diragukan.

Keputusan Dewan Garda tentu saja menimbulkan reaksi keras dari politisi kiri khususnya di tubuh Majelis yang mereka kuasai. Sebagai protes atas keputusan Dewan Garda, lebih dari sepertiga anggota Majelis Iran atau sekitar 117 anggota mengundurkan diri. Pengunduran diri massal tersebut tentu saja akan mempengaruhi parlemen dalam menjalankan fungsinya, karena untuk memulai sebuah sidang parlemen harus mencapai kuorum sebanyak dua pertiga anggota. Reaksi keras lainnya juga dilakukan oleh sekitar 54 anggota Majelis yang mengancam akan memboikot pemilu parlemen jika Dewan Garda tetap tidak meloloskan caleg reformis dan membatasi hak pilih rakyat Iran. Kubu kiri menganggap kubu kanan melancarkan taktik totaliter dan diktator untuk memuluskan jalan memenangkan pemilu parlemen sekaligus mengembalikan dominasi kubu mullah “konservatif” atas parlemen Iran yang direbut kubu mullah “reformis” pada pemilu sebelumnya.

Situasi tersebut pada akhirnya membawa posisi yang dilematis bagi Presiden Khatami dalam menyikapi krisis politik yang terjadi. Presiden Khatami yang tentunya akan kehilangan banyak pendukungnya di Majelis, bereaksi keras dan menyetujui untuk menunda pemilu parlemen 20 Februari mendatang. Namun, kekuasaan presiden Iran sangatlah terbatas,

³ Kompas Cyber Media, 24 Januari 2004.

sehingga mau tidak mau, Khatami harus tunduk pada keputusan pemimpin tertinggi, Iran, Ali Khamenei yang tetap menginginkan pemilu parlemen dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Oleh karena itu untuk meredakan ketegangan politik yang terjadi, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Hoseini Khamenei pada akhirnya meminta Dewan Garda untuk "mempertimbangkan kembali" keputusan pendiskualifikasian calon anggota legislatif dari kubu kiri. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Setelah Khamenei turun tangan, pada akhirnya Dewan Garda melunak dan merevisi kembali keputusannya dengan meloloskan sekitar 1.160 nama dari jumlah 3.600 nama yang sempat didiskualifikasi. Namun, lebih dari 2.400 kandidat tetap terdiskualifikasi, termasuk para pemimpin kubu kiri, seperti Mohammad Reza Khatami, pemimpin Front Partisipasi Islam Iran sekaligus adik kandung Presiden Khatami, Behzad Nabavi, Deputy jebir parlemen, serta Elaheh Koulaee dan Fatemeh Haqiqatjou, aktivis pembela hak-hak wanita.

Menjelang pemilu parlemen juga diwarnai oleh aksi pembredelan dua media massa kiri, yakni *Shargh* dan *Yas-e No* oleh Pengadilan Republik Islam Iran yang dikuasai kubu kanan.⁴ Kedua surat kabar tersebut berani mempublikasikan sebuah surat terbuka dari para anggota parlemen yang aktif dari kubu kiri yang mempertanyakan peran Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pendiskualifikasian massal yang dilakukan Dewan Garda terhadap para kandidat kubu kiri.⁵ Surat terbuka sebanyak enam

halaman yang dibacakan dalam aksi protes anggota parlemen dari kubu kiri juga mengungkapkan keprihatinan mereka akan masa depan negara. "*A parliament elected in a sham election will not be able to defend the rights of the people or the security of the country.*"⁶

Meski dilaporkan telah menerima perintah dari Dewan Tertinggi Keamanan Nasional agar tak memuat surat tersebut, namun kedua surat kabar tersebut tetap menerbitkannya. Karena para pemilik surat kabar tersebut telah menyadari bahwa cepat atau lambat surat kabar mereka akan dibredel akibat artikel-artikel dalam surat kabar tersebut yang isinya menyerang kubu kanan dan proses diskualifikasi kandidat kubu kiri.⁷

Dalam menghadapi pemilu parlemen kali ini, juga tersiar kabar bahwa kubu kanan bahkan telah mencetak kartu-kartu pemilih palsu. Namun, Menteri Intelijen Ali Yunesi segera menepis tuduhan yang dilansir kubu kiri tersebut dan sebagaimana yang dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA, menyatakan bahwa "tidak benar telah terjadi penyebaran kartu-kartu identitas palsu dalam jumlah besar yang tak terdeteksi oleh organisasi-organisasi pengawas dan

apakah Khamenei telah ikut merestui pendiskualifikasian 2.400 calon legislator dan menutup peluang mereka untuk berkompetisi dalam pemilu, lihat,

<http://www.kompas.com>, 4 Februari 2004.

⁶ Lihat, <http://www.cnn.com>, 19 Februari 2004.

⁷ Berdasarkan laporan dari sumber non pemerintah, keputusan pembredelan surat kabar *Shargh* akan dicabut dan *Shargh* diizinkan untuk terbit kembali. Analisis mempercayai bahwa mantan presiden Hashemi Rafsanjani kemungkinan melakukan intervensi atas kasus pemberedelan *Shargh*. Hal ini dimungkinkan karena pemegang lisensi *Shargh*, Mohammad Atrianfar, memiliki kedekatan hubungan dengan Rafsanjani mengingat Atrianfar pernah menjabat sebagai ketua *Executives of Construction Party* (ECP), partai yang didirikan oleh Rafsanjani.

Lihat,

http://www.irannewsdaily.com/asp/iran_news.asp. Dan memang setelah pemilu parlemen terselenggara, pemerintah mencabut kembali keputusan pembredelan *Shargh* pada 28 Februari 2004, dan surat kabar tersebut terbit kembali sejak 3 Maret 2004.

⁴ Bersamaan dengan berita pembredelan tersebut, tersiar kabar bahwa partai kiri pro-reformis terbesar pimpinan Reza Khatami, IIPF, juga diperintahkan untuk dibubarkan oleh pengadilan Republik Islam Iran. Lihat, http://www.irannewsdaily.com/asp/iran_news.asp.

⁵ Dalam surat terbuka itu, sekitar 70 politisi kiri yang mengundurkan diri dari parlemen sebagai protes menyatakan tindakan pendiskualifikasian itu telah memperlebar jurang pemisah antara rezim dan rakyat. Mereka juga mempertanyakan

pelaksana pemilu.” Ali Yunesi menambahkan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan bagian dari perang urat saraf yang dilancarkan terhadap Republik Islam yang telah berusia 25 tahun.⁸

Kemenangan Kubu Kanan Pragmatis: Kekalahan Musuh Iran?

Meski dibayang-bayangi oleh per-seteruan keras antara kubu kanan dan kubu kiri yang termanifestasi dalam pertentangan Dewan Garda dan Majelis, namun pada akhirnya pemilu parlemen ke-7 tetap digelar pada 20 Februari 2004. Pemungutan suara dimulai secara serentak di seluruh penjuru Iran pada pagi hari tepatnya pukul 08.00 pagi, kecuali kota Bam.⁹ Sekitar 46 juta rakyat Iran berusia di atas 15 tahun yang memiliki hak suara akan memilih 4.679 kandidat legislatif yang bertarung untuk memperebutkan 290 kursi parlemen. Namun, suasana per-seteruan antara kubu kanan dan kubu kiri masih kental terasa.

Di satu sisi, kubu kanan berusaha keras meyakinkan rakyat Iran untuk berpartisipasi dan melakukan pencoblosan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat di mesjid-mesjid dan berbagai sekolah. Radio dan televisi pemerintah secara terus-menerus menyiarkan berbagai komentar dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa pemberian suara menunjukkan perlawanan rakyat Iran terhadap musuh dan setiap suara merupakan tamparan ke wajah Amerika. Hal ini juga diperkuat oleh desakan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei agar rakyat Iran berbondong-bondong memberikan suara sebagai sebuah langkah untuk menampar wajah “musuh-musuh” Iran. Sementara di sisi lain, kubu kiri berharap partisipasi rakyat pemilih akan merosot hingga separuh di daerah-daerah basis kekuatan mereka seperti di

Teheran. Mereka juga berusaha memboikot pemungutan suara untuk menjatuhkan legitimasi pemilu sekaligus mempermalukan kubu kanan.¹⁰

Yang menarik dalam pemilu parlemen Iran kali ini, per-seteruan kubu kiri dan kanan juga berlangsung dalam dunia maya dan elektronik, Seperti halnya pada pemilu legislatif di Indonesia April 2004, di mana kelompok pendukung partai politik tertentu melakukan kampanye positif maupun negatif melalui perangkat elektronik, dalam pemilu legislatif Iran kali ini, para pendukung aksi boikot juga memanfaatkan internet dan layanan pesan pendek (SMS) telepon genggam untuk mempengaruhi bahkan mendesak rakyat pemilih agar tidak mencoblos atau bersikap golput. Sedangkan para pendukung kubu kanan juga berusaha menyebarkan pesan-pesan yang mendesak rakyat pemilih untuk mencoblos. Menurut analisis politik Iran, Davoud Hermidas Bavand, “makin kecil jumlah warga yang mencoblos, semakin besar “kemenangan diam” kubu kiri.

Namun aksi boikot pemilu yang dilakukan kubu kiri tidak berhasil membendung kekuatan konservatif untuk memenangkan pemilu parlemen ke-7. Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, kubu kanan pada akhirnya berhasil menguasai parlemen yang sempat direbut kubu kiri dalam pemilu parlemen ke-6. Berdasarkan perhitungan Kementerian Dalam Negeri Iran, dalam pemilu putaran pertama, kubu kanan berhasil memperoleh 150 dari 290 kursi parlemen, dan bahkan unggul di Teheran yang *notabene* daerah basis kekuatan kubu kiri. Sementara kubu kiri memperoleh 40 kursi dan kelompok independen memperoleh 30 kursi. Sehingga jumlah kandidat yang memperoleh suara minimal 25 persen dan lolos pada putaran pertama sekitar 225 kandidat dari total 4.679 kandidat yang berkompetisi. Sedangkan pemilu parlemen putaran kedua, dilaksanakan pada hari

⁸ Lihat, <http://www.kompas.com>, 4 Februari 2004.

⁹ Gempa dahsyat menimpa kota Bam pada Desember 2003, menghancurkan kota bersejarah tersebut dan menewaskan sekitar 30.000 jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara di kota tersebut.

¹⁰ Pada pemilu parlemen ke-6, tahun 2000, kubu kiri berhasil mengajak 67,2 % rakyat pemilih di seluruh negeri dan secara khusus 46,6 persen pemilih di Teheran, lihat *Kompas*, 22 Februari 2004.

Jum'at, 30 April 2004 untuk memilih kandidat yang akan mengisi 64 kursi yang masih kosong.¹¹

Pada pemilu parlemen kali ini, dunia internasional untuk kesekian kalinya kembali keliru dalam membaca perkembangan politik di Iran. Sejak beberapa bulan sebelum pemilu, media massa asing memprediksikan bahwa akan terjadi penurunan rakyat pemilih secara drastis akibat manuver politik Dewan Garda yang mempertajam krisis politik di Iran. Namun, kenyataan berkata lain. Pada hari Jum'at, 20 Februari 2004 dunia kembali menyaksikan jutaan rakyat Iran berduyunduyun mendatangi tempat-tempat pemungutan suara.

Meski mengalami penurunan jumlah pemilih, namun tidak sedrastis yang diprediksikan oleh media-media lokal maupun asing. Menurut kantor berita IRNA, diperkirakan sekitar 2 juta dari 6,4 juta pemilih di Teheran, atau sekitar lebih dari 31 persen menggunakan hak pilihnya. Sementara berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Iran, jumlah bilik suara yang tersedia sebanyak 39.885 dengan jumlah petugas sekitar 600.000 orang, dan jumlah pemilih yang memiliki hak suara sekitar 23.725.724, dan di Teheran terdapat sekitar 1.971.748 pemilih.¹²

Sedangkan pada pemilu parlemen empat tahun yang lalu, jumlah pemilih di Teheran mencapai 42 %. Sementara itu, terdapat perbedaan dalam laporan mengenai jumlah pemilih secara nasional. Media massa pemerintah melaporkan sekitar 46 juta pemilih menggunakan hak pilihnya meskipun terdapat seruan pemboikotan pemilu oleh kubu kiri. Sedangkan pihak oposisi menyebutkan terjadinya

penurunan jumlah pemilih, yakni hanya mencapai 20%, jauh lebih rendah dibandingkan pemilu parlemen ke-6 yang mencapai 67% pemilih yang turut berpartisipasi.

Hasil pemilu parlemen menunjukkan kemenangan kubu kanan. Namun, apabila dicermati, sebenarnya yang berhasil meraih suara terbanyak adalah kelompok kanan pragmatis atau kelompok tengah yakni *Abadgaran* atau Koalisi untuk Pembangunan Iran Islami (*the Coalition on Developers of Islamic Iran*) yang berhasil meraih 60 persen kursi di Majelis. Platform kelompok tengah tersebut berisi seruan untuk “menghormati privasi” dan “pemberdayaan perempuan”, dan menuntut pengurangan “intervensi pemerintah dalam perekonomian.”¹³

Sementara itu, reformis akan diwakili oleh koalisi baru, yakni *Coalition for Iran*, yang terbentuk sebelum pemilu parlemen berlangsung dan terdiri dari delapan kelompok reformis. Juru bicara koalisi reformis, Ali Akbar Mohthasami-Pur, memutuskan untuk berkompromi dan bekerja sama dengan kelompok konservatif pragmatis dengan fokus utama pada upaya perbaikan dan kemajuan ekonomi.

Pada pemilu putaran pertama telah melahirkan tokoh politik baru dari kelompok tengah, yakni Gholamali Haddad-Adel yang memperoleh suara terbanyak di kota Teheran. Haddad-Adel yang bukan berasal dari kaum mullah kemudian terpilih sebagai ketua parlemen menggantikan Mehdi Karroubi dengan perolehan suara sebesar 196 suara. Sementara itu, Mohammad-Reza Bahonar

¹¹ Pemilu putaran kedua di Teheran — yang masih terdapat satu kursi kosong — mengalami penundaan karena alasan efisiensi biaya, hingga pemilu presiden tahun 2005.

Lihat,

http://en.wikipedia.org/wiki/Majlis_of_Iran dan http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/3645217.stm, 6 Mei 2004.

¹²

Lihat,

http://en.wikipedia.org/wiki/Majlis_of_Iran.

¹³ Kelompok kanan pragmatis atau kelompok tengah ini didukung oleh kalangan bisnis dan kaum *Bazaar* (pedagang pasar). Kaum *Bazaar* berperan penting dalam mendanai Revolusi Islam Iran 1979. Sejak saat itulah hubungan antara kaum mullah “konservatif” dan kaum *Bazaar* terjalin sangat erat. Bahkan, banyak kaum mullah “konservatif” yang berasal dari lingkungan *Bazaar*, misalnya Rafsanjani, dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum menjadi Presiden Iran (1989-93; 1993-97). Lihat Riza Sihbudi, “Geliat Negeri Kaum “Mullah”, dalam <http://www.pikiranrakyat.co.id>, 28 Juni 2004.

terpilih sebagai wakil ketua I Majelis, Mohammad Hassan Abotorabi sebagai wakil ketua II, Mohsen Kohaki, Ahmad Nateq Nuri dan Hassan Nuei sebagai Komisioner, dan Hamid-Reza Haj Babaei, Jahanbakhsh Mohebinia, Alireza Zakani, Hossein Sobhani-Nia, Ahmad Musavi dan Elyas Naderan sebagai Sekretaris Majelis.

Parlemen baru hasil pemilu dijadwalkan akan mulai bertugas pada 27 Mei 2004. Ketua Majelis terpilih, Haddad-Adel menegaskan bahwa prioritas utama Majelis ke-7 adalah upaya perbaikan dan kemajuan ekonomi yang selama ini cenderung diabaikan oleh Majelis sebelumnya. Kubu kiri yang menguasai Majelis sebelumnya dianggap mengabaikan ekonomi di mana sektor ekonomi berada di bawah kontrol negara yang cukup ketat sehingga membuka peluang bagi praktek korupsi di kalangan birokrasi serta tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi dua pertiga rakyat Iran di bawah usia 30 tahun. Majelis ke-7 juga diharapkan tidak lagi bersifat faksional. Haddad-Adel mengungkapkan harapannya:

*"I hope the high wall separating the political factions in the 6th Majlis will be dismantled, a wall that has caused tension in the previous parliament."*¹⁴

Bagi kubu kanan, pemilu parlemen kali ini juga mengekspresikan bukti tetap kuatnya loyalitas rakyat Iran terhadap revolusi Islam yang menginjak usia 25 tahun. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga menyebutkan bahwa pemilu parlemen yang dimenangkan kubu kanan pragmatis merupakan sebuah kemenangan bangsa Iran dan Islam. Sebaliknya, menurut Khamenei, pihak yang kalah adalah Amerika, Zionisme, dan musuh-musuh bangsa Iran.

Sementara itu, bagi kubu kiri, hasil pemilu parlemen tersebut merupakan sebuah "kegagalan historis" di mana rakyat Iran tidak memiliki kebebasan memilih akibat pembatasan caleg reformis oleh Dewan Garda. Rasoul Mehrparvar, salah

seorang anggota parlemen yang namanya didiskualifikasi dalam pemilu menyatakan dalam sidang terbuka parlemen yang disiarkan secara langsung oleh radio pemerintah bahwa kemenangan dalam sebuah kompetisi tanpa saingan bukan sesuatu yang hebat, melainkan sebuah kegagalan historis.

Antusiasme rakyat Iran dalam pemilu parlemen kali ini juga mengejutkan berbagai media asing yang meliput secara langsung berlangsungnya pemilu parlemen di Iran. Salah seorang koresponden jaringan televisi Spanyol TVE menggambarkan partisipasi rakyat Iran sebagai berikut:

*"The world has not come to know the Iranians yet. I thought that the people would not take part in the election but now I see that like the year 2000 elections in Iran, the people's turn out was excellent and glorious and this warlike for the Iranian's enemies."*¹⁵

Tingginya partisipasi rakyat Iran membuat frustrasi propaganda media Barat dalam pemilu parlemen kali ini. Besarnya partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan sebuah pesan bagi dunia luar bahwa mereka kembali keliru membaca mengenai bangsa Iran. Antusiasme rakyat Iran tersebut juga membuktikan bahwa meskipun terdapat keinginan dan upaya AS untuk menggoyahkan dukungan rakyat Iran terhadap pemerintahan Islam, namun sebagian besar rakyat Iran tetap mendukung sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Hal ini juga menunjukkan kematangan politik rakyat Iran yang telah berpartisipasi dalam 24 pemilihan umum sejak kemenangan Revolusi Islam 25 tahun lalu. Dan nampaknya rakyat Iran tetap memegang teguh ajaran Pemimpin Revolusi Islam Iran Imam Khomeini bahwa mengabaikan pemilihan umum sama saja dengan mengkhianati Islam dan negara.

¹⁴ <http://www.tehrantimes.com>, 23 Februari 2004.

¹⁵ Lihat, <http://www.irib.ir/worldservice/englishradio>, 27 Februari 2004.

Respons Internasional dan Sikap Iran

Pemilu parlemen ke-7 Iran tentu saja mengundang respons internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan keprihatinannya atas pendiskualifikasian kandidat dari kubu kiri oleh Dewan Garda dalam pemilu parlemen. Sebelum pemilu parlemen terselenggara, pemerintah AS mengingatkan bahwa parlemen Iran yang akan datang kemungkinan tak akan merefleksikan aspirasi rakyat Iran, yang pada pemilu parlemen terdahulu telah mengalihkan dukungan mereka dalam jumlah besar kepada para pemimpin reformis. Pemerintah AS melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Adam Ereli, menegaskan bahwa tindakan Dewan Garda tersebut tidak mencerminkan pemilihan bebas, dan jujur serta tidak sesuai dengan norma-norma internasional. Ereli menambahkan bahwa pemerintah AS mendorong pemerintah Iran untuk mendengarkan pendapat rakyat Iran dan melangsungkan pemilihan umum secara bebas dan adil.¹⁶

Menanggapi hasil pemilu, juru bicara Departemen Luar Negeri Richard Boucher mengekspresikan kekecewaan pemerintah Amerika dengan menyatakan bahwa:

*"It was not an electoral process that met international standards and I think you've seen other members of the international community say that. But we do continue to believe the Iranian people deserve a government that responds to their aspirations, and we believe that desire on the part of the Iranian people will continue to be expressed in a variety of ways."*¹⁷

Keprihatinan yang sama juga dilontarkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana. Mengomentari keputusan Dewan Garda Iran mendiskualifikasi kandidat kubu kiri dalam pemilu parlemen, Solana mengungkapkan bahwa pemilu parlemen

Iran tidak akan dipercaya kecuali keputusan diskualifikasi tersebut dibatalkan. Dalam kunjungannya ke Teheran untuk membahas mengenai hubungan Iran dengan Eropa, Solana mengungkapkan bahwa sulit untuk menjelaskan kepada parlemen Eropa bagaimana anggota parlemen Iran yang terpilih pada pemilu sebelumnya tidak dapat berkompetisi kembali dalam pemilu kali ini.¹⁸ Sebagai respons atas perkembangan politik yang terjadi di Iran, para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan dan mengeluarkan draft pernyataan yang berbunyi:

*"The Council of EU foreign ministers expressed its deep regret and disappointment that large numbers of candidates were prevented from standing in this year's parliamentary elections... making a genuine democratic choice by the Iranian people impossible."*¹⁹

Menyikapi kritikan pemerintah AS dan Uni Eropa, Pemerintah Iran melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Hamid Reza Asefi, menyatakan bahwa hal tersebut mengindikasikan campur tangan secara terang-terangan terhadap urusan dalam negeri republik Islam dan campur tangan asing tersebut hanya akan memperkeruh situasi dalam negeri Iran. Asefi juga menyatakan kemarahannya terhadap pemerintah AS bahwa "American's statements concerning Iran's elections, while they avoid holding elections in Iraq... indicate a contradiction in American policies."²⁰

Kritik pemerintah AS tersebut juga dapat berlaku bagi AS sendiri. Justru pada pemilu presiden AS tahun 2000, George W. Bush memasuki Gedung Putih berdasarkan keputusan pengadilan AS bukan berasal dari mayoritas suara rakyat, karena Bush hanya memperoleh 25 % suara. Sehingga jika AS menyebut pemilu

¹⁶ <http://www.cnn.com>, 14 Januari 2004.

¹⁷ http://www.parstimes.com/news/archive/2004/voa/boucher_election.htm | US, 23 Februari 2004.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/3512985.stm, 23 Februari 2004.

²⁰ <http://www.washingtontimes.com/upi-breaking>, 10 Februari 2004.

parlemen Iran tidak *legitimate* karena minimnya suara rakyat, maka berdasarkan asumsi tersebut, tentu pemilihan presiden AS tahun 2000 juga bisa dikatakan tidak *legitimate* pula.

Gerakan Reformasi Iran dan Resistensi Kubu Kanan

Naiknya Mohammad Khatami ke kursi presiden menggantikan Hojjatul Islam Hashemi Rafsanjani turut menandai era baru dalam percaturan politik Iran yang selama ini dikuasai oleh kubu kanan. Pada saat pemilu presiden 1997 untuk pertama kalinya seorang kandidat dari kubu kiri berhasil meraih suara sebesar 69% mengalahkan kandidat dari kubu kanan, yakni Ali Akbar Nateq-Nouri. Kemenangan Khatami dapat dikatakan pula sebagai kemenangan awal bagi kubu kiri. Bahkan para analis Iran melukiskan peristiwa 2 Khordad 1374 (kalender versi Persia yang bertepatan dengan 22 Mei 1997) sebagai titik balik sejarah negeri mullah pasca Revolusi Islam Iran 1979 dan menyebutnya sebagai *silent revolution* dari kaum muda Iran.

Meskipun terasa berlebihan, namun kemenangan Khatami mengusung gagasan-gagasan akan keterbukaan dalam perpolitikan Iran dan reformasi, serta komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia, hak-hak wanita, dan politik *détente* (peredaan ketegangan) dengan negara Barat dan Dunia Islam, menunjukkan keberhasilannya menangkap aspirasi rakyat Iran yang selama ini merasa bahwa sistem politik Iran (baca: *Velayat-e Faqih*) tidak cukup memberi ruang bagi rakyat Iran untuk mengekspresikan pikiran dan tindakannya lebih bebas namun tetap dalam nafas Revolusi Islam yang digariskan Imam Khomeini.

Sejak saat itulah fenomena gerakan reformasi di Iran mulai muncul dan diperhitungkan dan menandai lahirnya dikhotomi kekuatan di pentas politik Iran, yakni kubu kiri "reformis" dan kubu kanan "konservatif". Namun, kekisruhan politik mulai mewarnai periode awal pemerintahan Khatami di tahun 1998. Kelompok yang

merasa tidak puas akan langkah perubahan yang diusung Khatami dan terbatasnya kebebasan berekspresi yang dirasakan di bawah pemerintahan Islam mulai melakukan demonstrasi dalam skala besar pada awal Maret, April, dan pertengahan Mei 1998.

Hal ini kemudian diperkeruh oleh serangan yang dilakukan kubu kanan yang menggunakan dua institusi politik yang dikuasainya, yakni Majelis dan lembaga yudikatif untuk menahan tokoh-tokoh yang melakukan pembangkangan. Walikota Teheran, Gholam-Husein Karbaschi ditahan pada 5 April 1998 atas tuduhan korupsi. Kemudian pada 21 Juni 1998, Abdullah Nuri diberhentikan dari jabatan sebagai menteri dalam negeri atas sikapnya mendukung aksi protes mahasiswa menentang represi konservatif serta dukungannya terhadap kebebasan pers. Tentu saja, perkembangan tersebut menunjukkan bangkitnya kembali kekuatan konservatif untuk menghalau laju reformasi yang diusung pemerintahan Khatami sekaligus menambah kesuraman situasi politik di Iran.

Perkembangan politik di tahun 2000 memberikan angin segar bagi gerakan reformasi Iran. Pada pemilu Majelis ke-6, kubu kiri sebagai kekuatan politik yang menopang Khatami berhasil menguasai 70% kursi di Majelis. Kubu reformis terdiri dari kelompok besar seperti Front Partisipasi Islam Iran (*Islamic Iran Participation Front*) yang memiliki kedekatan hubungan dengan Presiden Khatami dan Liga Ulama Militan (*League of Militant Clerics*) yang sebagian besar diikuti ulama moderat, serta *Executive of Construction Party* yang beraliran tengah. Sementara kubu kanan — yang mendominasi keanggotaan parlemen sebelumnya - terdiri dari koalisi pengikut garis keras Imam (*Coalition of Followers of the Line of Imam*). Komponen utama koalisi tersebut di antaranya terdapat Masyarakat Ulama Militan (*Society of Militant Clergy*) yang merupakan kelompok ulama konservatif terbesar dan Masyarakat Koalisi Islam (*Islamic Coalition Society*)

yang dikenal sebagai kelompok garis keras.

Kemenangan kubu kiri dalam pemilu parlemen tersebut menandai berakhirnya dominasi kubu kanan di tubuh parlemen Iran sejak masa Revolusi Islam Iran 1979.²¹ Kemenangan tersebut menunjukkan menguatnya kekuatan kubu kiri di Iran dan menambah optimisme dan kepercayaan diri bagi Khatami untuk mewujudkan program reformasi sosial dan politik di Iran, yakni meningkatkan kebebasan pers, mereformasi lembaga pengadilan, membangun pemerintahan yang lebih transparan dan memperbaiki hubungan dengan AS. Selama tiga tahun pemerintahannya, sulit bagi Khatami untuk merealisasikan janji-janji reformisnya karena tidak didukung oleh pusat-pusat kekuatan politik Iran, termasuk Majelis yang selama ini dikuasai kalangan konservatif. Oleh karena itu, kemenangan reformis dalam pemilu parlemen tersebut memuluskan jalan Khatami untuk terpilih kembali menjadi presiden dalam pemilu tahun 2001.

Namun, laju gerakan reformis Iran untuk melakukan pembaharuan sosial politik di Iran tampaknya mengalami banyak batu sandungan, khususnya dalam konteks pertarungan politik antara kubu kiri dan kubu kanan. Kendala terkini yang dihadapi bersumber pada perbedaan persepsi dalam menerjemahkan esensi Revolusi Islam Iran yang telah digariskan Imam Khomeini. Khatami bersama kubu kiri berusaha meliberalisasikan Iran dari kontrol sosial dan politik yang ketat dalam sistem *Velayat-e Faqih*, sementara kubu kanan yang juga mendapat dukungan dari pemimpin *Velayat-e Faqih* Ali Khamenei, menganggap bahwa perubahan sosial dan politik yang diusung kubu reformis justru akan mengikis nilai-nilai dan semangat revolusi Islam yang pada akhirnya bisa

²¹ Meskipun kubu kanan kehilangan kursi presiden, para dewan wali kota, dan parlemen, namun mereka masih kuat di departemen-departemen, Dewan Penjaga Undang-Undang, Dewan Konsultan, Dewan Pemelihara Kemaslahatan, lembaga yudikatif, sektor ekonomi, dan aparat keamanan, khususnya pengawal revolusi.

meruntuhkan Republik Islam Iran. Seperti halnya Glasnost dan Perestroika-nya Mikhail Gorbachev yang justru mengantar pada keruntuhan negara komunis Uni Soviet.

Berangkat dari kekhawatiran itulah, kubu kanan menghantam salah satu pilar kekuatan reformis, yakni media massa, yang merupakan ujung tombak dalam memobilisasi rakyat guna mendukung agenda reformasi. Sejak akhir Maret 2000, tak lama setelah kubu kiri memenangkan pemilu parlemen ke-6, sekitar 16 media massa kiri telah dibredel, serta sejumlah wartawan dan intelektual ditahan. Termasuk koran proreformis *Mosharekat* — dengan tiras mencapai satu juta eksemplar dalam sehari — yang diterbitkan oleh saudara kandung Presiden Khatami, Dr Reza Khatami, juga dibredel. Koran reformis yang tersisa hanya satu, yakni harian *Bayan* yang beroplak kecil.²²

Blunder politik kubu kanan tersebut diawali oleh keprihatinan pemimpin spiritual Ali Khamenei yang menyerang media massa kiri dengan sebutan corong musuh-musuh Islam serta mengadopsi “reformasi ala Amerika” yang *notabene* masih dianggap sebagai *Syaitan Buzurg* (Setan Besar) oleh bangsa Iran. Kubu kanan kemudian memperoleh momentum di mana pada saat konferensi di Berlin yang diselenggarakan oleh oposisi Iran di luar negeri, sejumlah tokoh reformis turut menghadiri konferensi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Iran sejak kemenangan revolusi tahun 1979. Televisi Iran kemudian menyiarkan langsung adegan dansa pria dan wanita

²² Sejumlah koran kiri, untuk pertama kalinya membongkar oknum-oknum dari dinas intelijen yang terlibat aksi pembunuhan terhadap sejumlah intelektual dan budayawan Iran. Menurunnya posisi mantan Presiden Hashemi Rafsanjani dalam pemilu anggota parlemen putaran pertama (menduduki urutan terakhir dari 30 anggota parlemen terpilih, dari wilayah Kota Teheran-Red), antara lain juga akibat peran media massa kiri yang mengkritik tajam berbagai penyimpangan pada era pemerintahannya 1989-1997. Lihat, Mustafa Abd. Rahman, *op.cit.*, hlm.68.

Iran dengan busana terbuka dalam konferensi itu.

Akibatnya kubu kiri menuai kutukan keras bahkan Presiden Khatami turut merasa terpojok oleh skandal konferensi Berlin tersebut. Oleh karena itu kecaman pemimpin spiritual Iran kemudian disambut oleh kubu konservatif dengan memberangus sejumlah besar koran reformis. Karena bagi kubu kanan, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan menerbitkan surat kabar — yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Khatami — sangat berlebihan dan mengancam ideologi revolusi Islam Iran.²³ Sementara bagi kubu kiri *“the press is the reform movement and the reform movement is the press.”*

Disilusi Rakyat Iran

Terpilihnya Mohammad Khatami sebagai Presiden Iran pada pemilu 1997 dianggap sebagai simbol kemenangan kelompok kiri bahkan Khatami dianggap sebagai simbol modernisme Iran. Rakyat Iran yang haus akan perubahan memberikan dukungan penuh terhadap presiden yang juga memiliki pemahaman mendalam mengenai peradaban Barat. Dalam kampanye pemilu, Khatami mengangkat isu yang bernuansa retorika filsafat Barat, yakni “toleransi, modernisme, dan keterbukaan”.

Gagasan-gagasan reformis Khatami telah memikat tidak hanya publik Iran, tapi juga masyarakat internasional pun menyambut gagasannya mengenai dialog antarperadaban, khususnya antara Islam dan Barat yang dikampanyekan dalam pidato kenegaraannya di hadapan parlemen Iran setelah terpilih sebagai presiden 1997 dan pada saat konferensi VIII OKI 9 Desember 1997 di Teheran. Kerinduan rakyat akan keterbukaan, pembaruan, dan keadilan telah mempertemukan mereka dengan misi Khatami yang mengusung isu “toleransi, modernisme, dan keterbukaan”. Hal tersebut menciptakan sinergi kuat antara rakyat dengan pemimpin negara

karena legitimasi rakyat diberikan sepenuhnya kepada pemerintahan Khatami yang diharapkan akan melakukan perubahan di bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Meskipun mendapat dukungan dari Majelis yang dikuasai kubu kiri, namun perubahan yang dijanjikan Khatami belum dirasakan rakyat Iran. Jika sebelumnya rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada Khatami, kini kepercayaan tersebut perlahan memudar, tak terkecuali generasi muda Iran yang merupakan agen utama perubahan di Iran. Kekecewaan tersebut mencapai puncaknya tatkala terjadi aksi unjuk rasa berdarah mahasiswa Iran bulan Juli tahun 1999 yang sekaligus menjadi lonceng awal kegagalan strategi moderasi Khatami. Bahkan aksi unjuk rasa mahasiswa di Iran yang berkobar selama pertengahan Juni 2003 mengingatkan kembali memori akan gerakan-gerakan mahasiswa yang bersejarah dan membawa perubahan mendasar di Iran.²⁴

Namun, apabila dicermati secara seksama, terdapat perbedaan antara aksi unjuk rasa mahasiswa tahun 1999 dengan tahun 2003. Aksi unjuk rasa mahasiswa tahun 1999 yang memprotes RUU pers baru yang diajukan kubu kanan di Majelis dan pembredelan Koran pro-reformasi *Salam*, masih menggunakan payung politik kubu kiri dan berada dalam koridor gerakan reformis. Sementara itu, aksi unjuk rasa mahasiswa tahun 2003, tidak mengusung program reformis, melainkan menyerang simbol negara, termasuk Presiden Khatami yang selama ini menjadi inspirator gerakan mahasiswa. Oleh karena itu timbul kecurigaan bahwa aksi unjuk rasa tersebut bukanlah gerakan mahasiswa murni. Melainkan telah ditunggangi oleh pihak-pihak asing yang menginginkan perubahan radikal dalam republik Islam Iran, khususnya melemahkan posisi *Velayat-E Faqih* sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem politik Iran.

²³ *Ibid.*

²⁴ Besarnya peranan mahasiswa dapat dicermati dalam Revolusi Konstitusi Iran tahun 1906 pada masa Dinasti Pahlevi, serta Revolusi Islam Iran tahun 1979 pimpinan Ayatollah Khomeini.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, Pemimpin Spiritual Ali Khamenei menyebut para pengunjung rasa sebagai antek-antek AS dan Zionis.

Para mahasiswa Iran saat ini merupakan generasi muda yang tidak turut menyaksikan luapan kegembiraan atas kemenangan revolusi Islam maupun masa isolasi dunia internasional. Bahkan mereka tidak merasakan pengalaman unifikasi atau konsolidasi kekuatan ketika terjadi perang melawan Irak.²⁵ Bagi generasi muda Iran saat ini, revolusi Islam 1979 merupakan sebuah kenangan lama dengan gaung yang lemah. Sementara itu upaya kaum konservatif untuk terus menyegarkan memori akan jasa-jasa para syuhada Iran dapat dikatakan sebagai sebuah langkah untuk mempertahankan patronasi dan hak-hak istimewa yang dinikmati sejak revolusi Islam.

Faktor-faktor yang memobilisasi kaum muda Iran adalah represi sosial dan budaya yang mereka tanggung serta masa depan yang kurang menjanjikan akibat meningkatnya angka pengangguran. Dalam sebuah *polling* yang ditujukan bagi para mahasiswa, sekitar 84% mahasiswa tidak setuju dengan haluan negara Republik Islam Iran.²⁶ Kekhawatiran akan masa depan dirasakan generasi muda Iran mengingat lapangan kerja yang tersedia hanya sekitar 350.000 bagi satu juta pencari kerja di Iran. Akibat adanya deprivasi ekonomi dan pembatasan-pembatasan kultural telah mengubah arah gerakan kelompok-kelompok mahasiswa Iran. Jika sebelumnya mereka berperan sebagai perangkat pemerintah dan cenderung bersikap lunak dan partisipatoris terhadap pemerintah, namun kini gerakan mereka bersifat radikal.

Salah satu organisasi mahasiswa yang mengilustrasikan evolusi tersebut

ialah Kantor Pengokohan Persatuan (*Office for Consolidation of Unity*). Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1980-an sebagai instrumen indoktrinasi revolusi. Organisasi ini kemudian menjadi salah satu pendukung utama strategi reformasi gradual Khatami. Kini, setelah beberapa pemimpinnya berada di balik penjara, organisasi tersebut kemudian mulai meninggalkan dukungannya terhadap reformasi yang dilakukan bertahap dan menginginkan perubahan secepatnya. Sehingga aksi unjuk rasa di jalan pun menjadi pilihan terbaik saat ini.

Semangat defian dalam diri kaum muda terefleksi dalam pernyataan salah seorang pemimpin mahasiswa, 'Ali Afshari, yang menyerang kebijakan kaum konservatif sebagai "destruktif dan represif," serta menganggap strategi gradualisme-nya Khatami bersifat "mandul."²⁷ Protes yang dilancarkan para mahasiswa tersebut mengganggu bahkan mengejek Presiden Khatami dengan meneriakkan "moderasi merupakan penghalang reformasi"²⁸ Demonstrasi mahasiswa Iran juga menjadi pelopor oposisi nasional terhadap putusan hukuman mati Hashem Aghajari²⁹, seorang Guru Besar Sejarah yang menyerukan "pembaharuan religius" dan menantang para ulama dengan menyatakan bahwa Muslim

²⁷ *Financial Times*, 5 September 2002.

²⁸ *IRNA*, 23 Desember 2001.

²⁹ Pada musim panas 2002, Hashem Aghajari, seorang veteran perang yang mengalami cacat tubuh sekaligus guru besar sejarah menyampaikan pidato yang eksplosif di kota Hamedan yang isinya mengecam negara agama yang berkuasa di Iran saat ini. Pada November 2002, hakim di Hamedan mendakwa Aghajari atas perbuatan menghujat negara, sehingga berdasarkan hukum Islam dan Iran patut diganjar hukuman mati. Namun, setelah protes yang dilancarkan mahasiswa dan pejabat pemerintah dari kalangan reformis di parlemen, Pemimpin Spiritual Ali Khamenei kemudian meminta agar keputusan terhadap Aghajari dipertimbangkan kembali. Pada Januari 2003, pengadilan tinggi Iran membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan persidangan ulang atas kasus Aghajari.

²⁵ Untuk memahami konsolidasi kekuatan di Iran masa revolusi, lihat Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran, Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm.179-182; Nasir Tamara dan Agnes Samsuri, *Perang Iran-Perang Irak*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm.63-75.

²⁶ *Iran Times*, 2 Agustus 2002.

“seharusnya tidak secara buta mematuhi para pemimpin agama.”³⁰

Kasus Aghajari menggambarkan bagaimana sebuah keyakinan revolusioner yang bersumber dari aspirasi rakyat dianggap sebagai melawan sistem, juga menggambarkan kapasitas gerakan mahasiswa sebagai mobilisator nasional. Perjuangan kaum muda Iran untuk menciptakan tatanan yang berbeda serta menolak menjadi kaum marjinal, diawali melalui pemilihan umum dan kini melalui konfrontasi di jalan.

Demonstrasi mahasiswa bahkan telah mendobrak salah satu tabu utama dalam republik Islam, yakni dengan menyerukan penghapusan jabatan Pemimpin Spiritual dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Dalam sebuah demonstrasi, slogan yang diusung adalah mengenai keputusan akibat berbagai kesulitan yang dialami rakyat. Para mahasiswa tersebut menuntut pemerintah untuk memahami perkembangan terkini dan memetik pelajaran dari pengalaman pahit pemerintahan-pemerintahan non-demokratis yang tidak mendapat dukungan rakyat.

Masalah ekonomi (baca: pengangguran) yang dialami kaum muda juga dirasakan oleh kalangan menengah yang mengalami penurunan standar hidup akibat penghasilan yang stagnan serta tingginya inflasi. Pada tahun 2003, aksi unjuk rasa para pekerja dan mahasiswa berlangsung di beberapa kota termasuk Teheran, Isfahan, Arik, Alborz, dan Shiraz. Pada musim dingin 2001-2002, sekitar 2 juta guru - juga profesional yang mempunyai penghasilan antara US \$130 dan US \$200 per bulan - berkali-kali turun ke jalan memprotes memburuknya daya beli masyarakat.

Sebenarnya, Iran memiliki potensi pasar terbesar di kawasan Teluk Persia sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari

mingguan ekonomi, *Business Week* (edisi 2 Juni 2004), menunjukkan bahwa Iran dengan populasi sekitar 69 juta jiwa memiliki cadangan *hard currency* (mata uang negara yang stabil secara politik dan ekonomi) sebesar \$35 miliar, PDB per kapita \$6.800, dan pertumbuhan PDB 5,9%. Oleh karena itu, menurut ekonom Iran Saeed Laylaz, apabila pemerintah saat ini bisa mengatasi masalah politik dan sosial maka Iran dapat membukukan pertumbuhan sebesar dua digit.

Disilusi yang dirasakan generasi muda Iran dirasakan pula oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah ulama senior, Ayatullah Jaleddin Taheri.³¹ Dalam pidato pengunduran dirinya sebagai Imam Jumat Isfahan, Taheri mengungkapkan kekecewaannya terhadap kaum konservatif bahwa:

*Genghis-like behavior, acting against the people and the law, isolating thinkers, paralyzing the government and throwing the country to the wind which will lead things to an inauspicious end... When the fire begins, it burns absolutely everything.*³²

Tersendatnya reformasi sosial dan politik yang dijalankan Presiden Khatami sejak 1997 - bahkan oleh sebagian besar kalangan dianggap gagal-serta kontroversi menjelang pemilu parlemen ke-7 dengan dicoretnya sebagian besar caleg reformis turut menambah daftar kekecewaan rakyat, termasuk kaum muda Iran. Hal ini mengakibatkan sebagian kaum muda Iran memilih untuk bersikap golput karena kebebasan yang mereka harapkan tidak kunjung mereka peroleh. Sehingga bagi mereka sia-sia belaka memberikan suara kepada reformis dalam pemilu parlemen

³⁰ Lihat, Ray Taykeh, “Iran at Crossroads”, *Middle East Journal*, Vol. 57, No.1, Winter 2003, hlm.49.

³¹ Sebelumnya, ulama senior Ayatullah Hussein Ali Montazeri yang pernah menjadi calon pengganti Khomeini, juga mengkritik pemerintah yang mengakibatkan dirinya dibungkam dan dikenai tahanan rumah pada tahun 1989. Setelah Montazeri, tidak ada lagi ulama yang berani menentang sikap otoriter pemerintah, hingga muncullah Taheri yang juga mengkritik kubu kanan yang menguasai pemerintahan saat ini.

³² *Nowruz*, 10 Juli 2002, dalam Taykeh, hlm.47.

ke-7, karena reformis pun tak mampu menghadapi status quo yang dinikmati kaum konservatif. *"Young people are disappointed now. We want more freedoms, but we don't have them, so I think most of us will not be voting. There is no point."*³³

Besarnya angka pengangguran-meliputi dua pertiga rakyat Iran berusia di bawah 30 tahun - juga mengakibatkan kekecewaan kaum muda yang berujung pada pilihan golput yang diambil sebagai sebuah sikap politik kaum muda yang dialamatkan kepada kubu kiri maupun kanan. Bagi mereka, para politisi hanya berjuang untuk kepentingan diri sendiri, sehingga sebuah hal yang memalukan apabila para politisi tersebut mengharapkan generasi muda memberikan suara, sementara para politisi itu sendiri tidak memperjuangkan nasib mereka. *"The reformists are always talking about freedom and democracy. And the conservatives talk about religion. But what good is any of that if you can't get a job?"*³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pragmatisme tumbuh dalam diri generasi muda Iran akibat kekecewaan terhadap pemerintahan Khatami, meski angin perubahan telah dihembuskan sejak Khatami terpilih menjadi presiden Iran 1997.

Di samping generasi muda Iran yang terus meneriakkan perubahan, Hashem Aghajari yang saat ini masih mendekam di penjara dengan tuntutan hukuman mati, juga mengungkapkan kecamannya dalam surat terbuka yang dipublikasikan oleh surat kabar mahasiswa Iran, ISNA. Aghajari mengungkapkan bahwa dengan diadakannya pemilu legislatif di mana rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih kandidat mereka merupakan titik akhir bagi reformasi dalam rezim republik Islam dan perlawanan yang bersifat pasif tampaknya merupakan satu-

³³ Pernyataan ini diungkapkan oleh Leila, gadis Iran berusia 21 tahun dalam sebuah wawancara, lihat <http://www.cnn.com>, 16 Februari 2004.

³⁴ Ali, pemuda Iran berusia 19 tahun, mengungkapkan kekecewaannya atas sulitnya memperoleh pekerjaan di Iran, lihat <http://www.cnn.com>, 16 Februari 2004.

satunya pilihan yang ada saat ini. Menurutnya, rakyat Iran telah menyadari bahwa selama berkuasanya pemerintahan reformis di bawah Khatami, pemeliharaan dan perlindungan atas *status quo* tidak akan membawa kemajuan maupun perubahan. Aghajari menambahkan bahwa:

*"We are witnessing a comical repetition of history: in a very short period of time, the democratic face of the Iranian constitution is going to be turned into an autocratic face. The current generation should be given the right to choose their own structure of government and constitution. The Iranian people should..., with passive resistance, tell the totalitarians: No."*³⁵

Prospek Gerakan Reformasi Iran

Disilusi yang dirasakan rakyat Iran, termasuk generasi muda dan ulama serta akademisi menimbulkan kekhawatiran akankah gerakan reformasi di Iran akan lumpuh seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Tampaknya, kita tidak bisa dengan mudah memvonis mati reformasi yang tengah berlangsung di Iran. Sebab, meskipun bermunculan nada pesimistis khususnya yang diungkapkan para pengamat di Barat, gerakan reformasi di Iran belum habis sama sekali. Bahkan gerakan tersebut justru baru memulai fase baru dan signifikan. Di bawah kendali generasi politisi muda dan aktivis mahasiswa, gerakan reformasi telah mengubah taktik mereka, yakni diawali perjuangan melakukan perubahan dari dalam sistem menjadi melakukan tekanan dari luar sistem.

Fase baru dari gerakan reformasi tersebut dimulai pada Juli 2002 dalam pertemuan tahunan partai pro-reformasi terbesar Iran, yakni Front Partisipasi Islam yang diketuai oleh Muhammad Reza Khatami dan saat itu menguasai 130 dari 290 kursi parlemen Iran. Dalam pertemuan tersebut Reza Khatami menegaskan sikap partainya bahwa *"If the conservatives do not heed the public demands we will*

³⁵ Lihat <http://www.cnn.com>, 15 Februari 2004.

withdraw the reformist present from the regime, leaving power that lacks sufficient base of legitimacy."³⁶ Pernyataan tersebut mencerminkan pencanangan strategi baru kubu kiri "reformis" guna menekan rezim dari luar sistem. Termasuk di dalamnya penarikan mundur perwakilannya dari dalam sistem guna mengurangi legitimasi rakyat terhadap pemerintah.

Senada dengan Reza Khatami, tokoh reformis lainnya seperti Rajab 'Ali Mazru'i, juga menekankan bahwa "*If we come to a point where reforms fail to give results, we will leave the government.*" Mencermati perubahan sikap kubu kiri "reformis" tersebut, surat kabar Nowruz menggambarkan fenomena tersebut dengan mengungkapkan bahwa "*Apparently, there is no common language for the two sides. There is no option for (President) Khatami but to change his language and send a message his opponents will be able to understand.*"³⁷

Taktik kubu kiri tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelamatkan gerakan reformasi Iran yang digulirkan Presiden Khatami sejak 1997. Hal ini dilakukan mengingat langkah-langkah perubahan yang dilakukan melalui parlemen maupun media massa mengalami kebuntuan akibat perlawanan yang dilancarkan kubu kanan yang senantiasa menjegal agenda-genda reformasi yang dilancarkan kubu kiri baik melalui lembaga eksekutif maupun legislatif.

Taktik terbaru yang dilakukan kubu kiri ini terlihat dalam aksi pemboikotan pemilu yang dilakukan oleh kubu kiri yang berada di parlemen pada pemilu parlemen Iran ke-7. Kubu kiri tidak lagi segan berkonfrontasi dengan kubu kanan meskipun dengan konsekuensi dianggap menyerang bahkan menghancurkan pilar-pilar republik Islam yang dibangun sejak Revolusi Islam 1979. Meskipun pada akhirnya kubu kanan keluar sebagai pemenang dalam pemilu parlemen ke-7,

namun sulit dipungkiri bahwa kubu reformis tetap memegang legitimasi rakyat.

Oleh karena itu, apabila dicermati tampak bahwa arah baru gerakan reformasi ini terbentuk oleh koalisi para anggota parlemen reformis yang frustrasi, generasi muda, kalangan menengah, akademisi dan para ulama yang mengalami disilusi terhadap *status quo*. Kubu kiri inilah yang kemudian menantang fondasi ideologis negara dengan menawarkan visi alternatif, yakni penerimaan atas peran agama dalam urusan negara yang disertai oleh demokratisasi, transparansi, akuntabilitas pejabat pemerintah, kebebasan, hak-hak sipil, dan penegakan hukum.

Pasca pemilu parlemen ke-7, pertarungan dan perdebatan seputar ide-ide reformis tersebut kini bergerak ke dalam dua arena. Di luar sistem, kelompok reformis akan kembali ke masyarakat akar rumput dalam rangka membangun kembali partai dan mengembangkan organisasi non-pemerintah dan organ-organ *civil society* lainnya. Sedangkan di dalam sistem, tidak lagi difokuskan pada seputar perdebatan antara kubu kiri dengan kubu kanan, melainkan di dalam kubu kanan itu sendiri yang saat ini mendominasi keanggotaan Majelis. Transformasi gerakan reformasi tersebut menunjukkan tetap eksisnya gerakan reformasi di Iran.

Makna Hasil Pemilu Parlemen: Catatan Penutup

Pemilu parlemen ke-7 Iran telah usai dan kali ini kubu kanan pragmatis keluar sebagai pemenang mengalahkan kubu kiri "reformis". Tampaknya, patut dicermati mengapa pada pemilu parlemen kali ini kubu kiri menderita kekalahan besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah *Pertama*, menurunnya kredibilitas kubu kiri di mata rakyat Iran akibat kegagalan mereka memenuhi janji-janji reformis. Kendati rakyat Iran tidak memungkiri realitas bahwa kubu kanan yang menguasai pilar-pilar kekuatan negara menjadi faktor penghalang terealisasinya program-program reformis, namun rakyat tetap

³⁶ *Iran Daily*, 28 Juli 2002, dalam Taykeh, hlm.47.

³⁷ *Mardom Salari*, 20 Juli 2002, *Nowruz*, 6 Mei 2002, dalam Taykeh, hlm.47.

memandang bahwa kubu kiri telah gagal memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. Bahkan, seandainya Dewan Garda membatalkan diskualifikasi ribuan kandidat reformis, mereka tidak secara otomatis akan memilih kembali kandidat reformis. Tanda-tanda melemahnya dukungan terhadap reformis juga tampak dalam aksi unjuk rasa para mahasiswa Juni 2003, yang mulai berani menuntut agar Presiden Khatami — yang *notabene* sebagai inspirator gerakan reformis — mengundurkan diri karena dinilai lemah menghadapi kubu kanan “konservatif”.

Kedua, terjadinya perpecahan dalam barisan kubu kiri. Indikasi ini terlihat sebelum pemilu parlemen ke-7, tepatnya ketika pemilihan walikota pada 28 Februari 2003 lalu di mana kubu kiri ternyata maju dengan berbagai bendera, tidak lagi di bawah satu bendera yang sama. Akibatnya, secara mengejutkan kubu kanan memenangkan pemilihan wali kota tersebut³⁸. Kubu Al Thani Al Khordad (2 Mei) yang selama ini menjadi payung semua faksi kiri beraliran reformis dianggap tidak relevan lagi menjadi wadah politik bagi semua faksi kiri. Faksi kiri radikal, khususnya Front Partisipasi Islam (IIPF) yang secara terang-terangan menggugat sistem *Velayat-e Faqih* kini dianggap menjadi beban politik Al Thani Al Khordad. Dan dalam pemilu parlemen kali ini, kubu kiri diwakili oleh *Coallition for Iran* yang memayungi delapan kelompok reformis yang tidak turut serta memboikot pemilu. Ketidakkompakan kubu reformis pun diakui oleh Mohammad Reza Khatami - yang turut serta dalam aksi boikot - bahwa masalah utama yang dihadapi gerakan reformasi saat ini adalah kurangnya organisasi dan partai yang kuat. Oleh karena itu langkah keluar dari Majelis dan keluar dari pusat kekuasaan merupakan kesempatan bagi reformis untuk melakukan reorganisasi partai.

³⁸ Kubu kanan berhasil menguasai sebagian besar kursi wali kota di kota-kota besar seperti kota suci Qom, Mashad, dan Isfahan. Bahkan, kubu konservatif menang telak di ibu kota Teheran dengan meraih 14 suara dari 15 suara.

Ketiga, keinginan kubu kanan menguasai kembali lembaga legislatif dan eksekutif. Kubu kanan sangat cemas melihat terus meningkatnya pengaruh kubu kiri dalam kehidupan politik Iran dewasa ini. Keberhasilan kubu kiri menguasai lembaga eksekutif dan legislatif dan senantiasa mendengungkan reformasi ke telinga rakyat melalui corong media massa, membuat kubu kanan mengambil langkah keras demi meredam langkah reformis yang mereka anggap membahayakan kelestarian ideologi revolusi Islam. Kubu kiri pula yang menggulirkan isu normalisasi hubungan dengan AS, yang bagi kubu kanan merupakan sebuah isu yang tabu untuk dibicarakan. Sehingga kubu kanan terus membangun opini bahwa kontak dengan AS dapat mengancam eksistensi Republik Islam Iran dan peran kaum mullah di Iran.

Sikap kubu kanan ini terlihat tatkala Ayatollah Jannati, Ketua Dewan Garda, menegaskan bahwa meski Iran bersedia menerima bantuan kemanusiaan dari AS atas musibah gempa bumi di kota Bam, namun hal itu bukan berarti hubungan kedua negara otomatis membaik. Oleh karena itulah, penting bagi kubu kanan untuk menguasai kembali lembaga legislatif demi memuluskan jalan bagi kandidat konservatif memenangkan pemilu presiden di tahun mendatang. Hal ini sangat memungkinkan mengingat masa jabatan dan kesempatan Mohammad Khatami menjadi presiden akan berakhir. Di samping itu tidak ada kandidat kubu kiri yang kuat selepas Khatami. Sementara itu, kubu kanan telah menyiapkan calon kuatnya untuk pemilu presiden 2005, yakni Dr. Mir Husein Musavi (mantan PM Iran di era 1980-an) yang bukan dari kalangan mullah. Dan, tampaknya hal ini mengindikasikan bahwa kaum mullah konservatif secara perlahan mulai menarik diri dari panggung politik Iran, agar tidak terlihat secara frontal menguasai posisi-posisi strategis meski secara *real* politik mereka tetap sebagai “penguasa” di belakang layar.

Keempat, Sikap kubu kanan yang kini juga mengangkat slogan-slogan

reformasi, khususnya reformasi di bidang ekonomi yang selama ini bukan menjadi prioritas utama kubu kiri. Selama tujuh tahun terakhir, kubu kiri lebih memprioritaskan reformasi politik ketimbang ekonomi. Sementara itu, kaum muda dan kalangan menengah kota telah mengalami frustrasi akibat kondisi ekonomi yang stagnan dan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Realitas inilah yang kemudian digarap oleh kubu kanan dan menjadi slogan reformasi mereka dalam kampanye pemilu dengan menggunakan nama *Abadgaran* atau Koalisi untuk Pembangunan Iran Islami (*the Coalition on Developers of Islamic Iran*). Dengan slogan tersebut, kubu kanan mencoba meyakinkan rakyat agar mengesampingkan pertikaian faksional dan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk kembali bekerja. Dan tampaknya strategi kubu kanan pun membawa hasil yang signifikan terbukti dengan kemenangan mereka dalam pemilu wali kota dan pemilu parlemen kali ini.

Kekalahan kubu kiri dalam pemilu parlemen kali ini tentu saja mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuatan dalam peta politik Republik Islam Iran. Realitas politik Iran tujuh tahun belakangan ini menunjukkan kekuatan kubu kiri mulai mengimbangi kekuatan kubu kanan dengan dikuasanya lembaga eksekutif dan yudikatif. Namun, saat ini peta politik Iran kembali diwarnai oleh dominasi kubu kanan (pragmatis) di setiap pilar pemerintahan Republik Islam Iran. Realitas ini tentu saja mengundang kekhawatiran tidak hanya publik Iran tapi juga dunia internasional. Akankah Republik Islam Iran kembali menampilkan “wajah garang”-nya — seperti masa Imam Khomeini — dan membawa Iran kembali terisolasi dari dunia internasional. Kendati kekhawatiran tersebut cukup beralasan, namun tampaknya kita tidak bisa menafikan adanya angin perubahan di republik Islam sepeninggal Pemimpin Besar Revolusi Islam Imam Khomeini, khususnya semenjak Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menjadi presiden hingga masa Khatami saat ini.

Doktrin reformasi yang dikampanyekan Khatami bersama kubu kiri juga telah mempengaruhi pemikiran kubu kanan. Sehingga dapat diungkapkan bahwa pemikiran reformis telah diterima oleh bangsa Iran secara luas, termasuk kalangan konservatif. Realitas ini disadari penuh oleh kubu kanan, sehingga anggota parlemen dari kubu kanan yang terpilih dalam pemilu parlemen ke-7 menegaskan bahwa mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Khatami di mana Khatami diyakini tetap membawa pengaruh moderasi di kalangan konservatif.

Bahkan, banyak kalangan yang meyakini bahwa kubu kanan telah memberi sinyal positif dan menunjukkan itikad baik untuk menjadi bagian dari komunitas internasional. Hal ini sangat penting mengingat dalam kampanye pemilu parlemen ke-7, mereka menjanjikan reformasi ekonomi khususnya menciptakan lapangan kerja bagi ribuan kaum muda Iran, keadilan sosial dalam hal pemberantasan korupsi, serta kebebasan politik khususnya di lingkungan universitas sekaligus menepis rumor bahwa parlemen baru yang terbentuk justru akan mengekang kebebasan politik. Mengingat kemajuan ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan kali ini, maka itu berarti pemerintah Iran membutuhkan investasi besar yang mustahil dilakukan tanpa bantuan investasi asing. Sehingga bukan tindakan yang bijaksana apabila pemerintah Iran saat ini mengasingkan diri dari komunitas internasional.

Oleh karena itu harapan rakyat Iran saat ini digantungkan kepada sayap kanan konservatif yang lebih moderat, pragmatis, berpendidikan, dan profesional, maupun sayap kanan reformis yang kemungkinan besar dapat muncul sebagai kekuatan politik baru, yakni kelompok tengah yang diharapkan mampu menyelamatkan gerakan reformasi di Iran. Tanpa menafikan besarnya peran revolusi Islam bagi bangsa Iran, tentunya kembali ke masa revolusi bukanlah pilihan rasional bagi bangsa Iran saat ini. Karena dalam evolusi kehidupan demokrasi di Iran saat ini, bangsa Iran

berada pada “*point of no return*” di mana reformisme merupakan pemikiran sekaligus gerakan masa depan Iran yang tentunya diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus disilusi rakyat Iran.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman, Musthafa. *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. Jakarta, Kompas, 2003.

Arab News, 27 Juli 2002.

Business Week, No.51/II/ 2 Juni 2004.

Financial Times, 5 September 2002.

<http://www.cnn.com>, 14 Januari 2004, 15 Februari 2004, 16 Februari 2004, 19 Februari 2004.

<http://www.kompas.com>, 24 Januari 2004, 4 Februari 2004, 17 Februari 2004, 22 Februari 2004.

<http://www.washingtontimes.com/upi-breaking>, 10 Februari 2004.

http://www.parstimes.com/news/archive/2004/voa/boucher_election.htm IUS, 23 Februari 2004.

http://www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/world/middle_east/3512985.stm, 23 Februari 2004, 6 Mei 2004.

<http://www.tehrantimes.com>, 23 Februari 2004.

<http://www.irib.ir/worldservice/englishradio>, 27 Februari 2004.

http://www.irannewsdaily.com/asp/iran_news.asp.

http://en.wikipedia.org/wiki/Majlis_of_Iran.

IRNA, 23 Desember 2001.

Iran Daily, 28 Juli 2002.

Iran Times, 2 Agustus 2002.

Mardom Salari, 20 Juli 2002.

Nowruz, 6 Mei 2002, 10 Juli 2002.

Sihbudi, Riza. *Dinamika Revolusi Islam Iran, Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini* Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989.

“Geliat Negeri Kaum Mullah”, <http://www.pikiranrakyat.co.id>, 28 Juni 2004.

Tamara, Nasir dan Agnes Samsuri. *Perang Iran - Perang Irak*. Jakarta, Sinar Harapan, 1981.

Taykeh, Ray. “Iran at Crossroads” dalam *Middle East Journal*, Vol.57, No.1, Winter 2003.